

**KATANAGARI  
SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK  
TOYOTOMI HIDEYOSHI**

**TIDAK BOLEH  
DICOPY**

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai  
salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh

FIQI FIRMANSYAH

NIM: 01110003



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DARMA PERSADA	
No Induk	0188 / FSI 106-07
No Klas	320.50952.FIR-A
Sabjek	Politik Jepang
Anal	MLHS
Lain-lain	

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra JEPANG**

**FAKULTAS SAstra**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA**

**2006**

**Halaman Persetujuan Pembimbing**

Skripsi yang berjudul

**KATANAGARI SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK**

**TOYOTOMI HIDEYOSHI**


Oleh

**FIQI FIRMANSYAH**

**NIM : 01110003**


Disetujui untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi Sarjana, oleh :

Pembimbing I

  
(Nani Dewi S. S.S., M.Pd.)

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Bahasa dan Sastra Jepang

  
(Syamsul Bahri, S.S)

Pembimbing II

  
(Syamsul Bahri, S.S)

**LEMBAR PERNYATAAN****KATANAGARI SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK****TOYOTOMI HIDEYOSHI**

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu Nani Dewi S. S.S, M.Pd. dan Bapak Syamsul Bahri, S.S, tidak merupakan jiplakan skripsi sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**FIQI FIRMANSYAH**

**Halaman Pengesahan**

Skripsi yang berjudul

**KATANAGARI SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK**

**TOYO'TOMI HIDEY OSHI**

Telah diuji dan diterima dengan baik (lulus) pada tanggal 12 bulan Mei, tahun 2006  
di hadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra.

Pembimbing / Penguji



(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

Ketua Panitia / Penguji



( Dra. Yuliasih Ibrahim )

Pembaca / Penguji



(Syamsul Bahri, S.S)

Sekretaris Panitia / Penguji



(Metty Suwandani, S.S)

Disahkan oleh

Ketua Jurusan

Bahasa dan Sastra Jepang



(Syamsul Bahri, S.S)



Dekan Fakultas Sastra

(Dr. Hj. Albertine S. Minderop, M.A)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hi robbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Katanagari Sebagai Kebijakan Politik Toyotomi Hideyoshi** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Sastra, pada Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nani Dewi S., S.S, MPd, selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Syamsul Bahri, S.S, selaku pembaca dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan-masukan pada skripsi ini.
3. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua Sidang Skripsi.
4. Ibu Meity Suwandani, S.S, selaku Sekretaris Sidang Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A, selaku Dosen Seminar Sejarah.
6. Ibu Dr. Hj. Albertine S Minderop M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra.
7. Seluruh dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang yang telah mendidik penulis.

8. Seluruh staff di lingkungan Fakultas Sastra dan Perpustakaan Universitas Darma Persada.
9. Papa, Mama, dan Neng yang telah banyak memberi dukungan doa, semangat, dan materil sehingga skripsi ini telah dapat saya selesaikan dengan baik.
10. Teman-teman Fakultas Sastra Universitas Darma Persada angkatan 2001.
11. Saudara-saudaraku di Studi Kerohanian Mahasiswa Islam UNSADA.
12. Teman-teman Alumni SMUN 44 : Ahmad Fauzi Sofwan, Fahmi Zuhdi Haikal, Roy Rochananto.
13. A' Athlon yang selama ini menjadi kawan setia pelepas kepenatan.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Sastra Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang khususnya dan seluruh mahasiswa Universitas Darma Persada umumnya serta berbagai pihak yang membutuhkannya. Segala saran dan kritik membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Jakarta, April 2006

Penulis

Fiqi Firmansyah

## ABSTRAK

FIQI FIRMANSYAH. **KATANAGARI SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK TOYOTOMI HIDEYOSHI**. Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra Universitas Darma Persada, Jakarta, April 2006.

Keberhasilan Toyotomi Hideyoshi dalam mempersatukan Jepang tidak hanya ditempuh dengan pengerahan kekuatan militer. Hideyoshi juga melakukan berbagai kebijakan politik domestik untuk mengokohkan kedudukan serta pemerintahannya atas Jepang. Salah satu kebijakan politiknya adalah dikeluarkannya peraturan *katanagari* pada tahun 1588 yaitu peraturan mengenai pelarangan kepemilikan dan penyitaan senjata pada kelas masyarakat di luar kelas militer khususnya para petani, sehingga dapat dibedakan antara golongan petani dan golongan militer.

Tujuan dikeluarkannya peraturan *katanagari* adalah untuk memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap kaum *samurai* dan mengurangi bahaya pemberontakan bersenjata dari para petani. Keputusan ini juga memisahkan *samurai* dari tanah garapan agar *samurai* tersebut menjadi lebih bergantung pada *daimyo* sebagai atasannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Ruang Lingkup .....	4
E. Metode Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANGKAH PENYATUAN JEPANG</b> .....	<b>7</b>
A. Feodalisme Gaya Shoen .....	7
B. Perang Saudara .....	8
C. Usaha Penyatuan Jepang oleh Oda Nobunaga .....	9



D. Usaha Penyatuan Jepang oleh Toyotomi Hideyoshi .....	19
---	----

### BAB III KATANAGARI SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK

TOYOTOMI HIDEYOSHI .....	28
A. Taiko Kenchi .....	30
B. Feodalisme di Bawah Toyotomi Hideyoshi .....	33
C. Katanagari .....	34
1. Pengertian Katanagari .....	34
2. Latar Belakang dikeluarkannya Katanagari .....	34
3. Tujuan dilaksanakannya Katanagari .....	35
4. Peraturan Katanagari .....	36
BAB IV KESIMPULAN .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
BIODATA PENULIS .....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Berawal dari jaman Muromachi (1333-1467) tepatnya dari tahun 1336 hingga tahun 1392 Jepang diwarnai pertentangan dengan terpecahnya istana Kyoto menjadi dua (*Nambokucho Tairitsu*), sehingga keadaan menjadi tidak normal dimana terdapat dua orang kaisar, di istana Selatan (Nara) dan istana Utara (Kyoto). Pertentangan ini memberi dampak terhadap semakin kuatnya posisi kaum tani dan tuan tanah daerah (*shugo daimyo*) dan semakin lemahnya kekuasaan Shogun Ashikaga di pemerintahan pusat. Stabilitas *bakufu* (pemerintahan militer) pun berkurang secara terus menerus. Singkatnya *shoen* (tanah-tanah pribadi yang kebal dari campur tangan kaisar) dan feodalisme *shoen* runtuh dalam era Muromachi dan dengan melemahnya wewenang *bakufu* maka *shugo* di daerah makin menyerupai penguasa tuan tanah feodal. Gejala ini puncaknya terjadi menjelang akhir abad ke-16, dimana Jepang terpecah-belah oleh perang saudara, saat itu penguasa-penguasa daerah bertempur merebut supremasi masing-masing.

Masa itu pun merupakan masa pertempuran yang berkepanjangan, yaitu masa jatuh-bangunnya pemimpin-pemimpin militer, tetapi di atas semuanya itu, masa itu adalah masanya Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu, tiga

pejuang besar pada akhir abad ke-16.<sup>1</sup> Ketiga orang itulah yang mengubah keadaan dan peta politik Jepang saat itu, perubahan dimulai saat Oda Nobunaga berambisi untuk mempersatukan Jepang, kemudian dilanjutkan oleh Toyotomi Hideyoshi serta dikukuhkan oleh Tokugawa Ieyasu. Pada saat itu Shogun Ashikaga sudah tidak dapat mengendalikan pemerintahan di seluruh Jepang, masing-masing penguasa daerah (*daimyo*) membentuk pasukannya masing-masing untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan penguasa yang lainnya. Apabila penguasa tuan tanah telah memiliki kekuatan lebih, maka ia akan menyerang propinsi lainnya untuk memperluas kekuasaannya. Masing-masing propinsi berusaha membangun kekuatan militer, kemudian berusaha memberontak terhadap sistem politik lama yang diterapkan oleh Shogun Ashikaga.

Oda Nobunaga merupakan salah seorang penguasa wilayah yang berambisi untuk mempersatukan Jepang, walaupun hanya tinggal di sebuah propinsi yang kecil. Tetapi bukan hanya Nobunaga yang memiliki ambisi tersebut, para *daimyo* yang lain pun menginginkan hal yang sama, beberapa diantaranya adalah Uesugi Kenshin dari Echizen, Takeda Shingen dari Kai, Asai Nagamasa dari Omi, Mori Terumoto penguasa propinsi-propinsi Barat, serta para *daimyo* di pulau Shikoku dan Kyushu. Dengan demikian ambisi Nobunaga sangat sulit dilakukan. Untuk melancarkan ambisinya ia bersekutu dengan beberapa *daimyo* dan panglima perang. Penguasa wilayah lain yang pertama kali dikalahkan oleh Nobunaga adalah Imagawa

---

<sup>1</sup> Shinji Kondo, *Japanese Military History: A Guide to The Literature* 1984 hal. 11

Yoshimoto pada tahun 1560. Oda Nobunaga terus mengadakan invasi ke daerah-daerah lawannya hingga pada suatu saat ia dikhianati oleh salah seorang Jendralnya, Akechi Mitsuhide, saat singgah di kuil Honno dalam perjalanannya ke propinsi-propinsi Barat untuk membantu Toyotomi Hideyoshi; dan terpaksa melakukan *seppuku* untuk menyelamatkan kehormatannya.

Toyotomi Hideyoshi adalah orang yang menggantikan Nobunaga sebagai pemersatu Jepang. Walaupun berasal dari keturunan petani-samurai, ia memiliki akal yang sangat cerdas, sehingga sepeninggal Nobunaga, Hideyoshi dengan cepat dapat segera menguasai keadaan. Pada saat kematian Oda Nobunaga, Hideyoshi tidak berada dekat dengan Nobunaga, karena sedang melakukan operasi penaklukan propinsi-propinsi Barat. Tindakan pertamanya setelah mengetahui tuannya dikhianati adalah segera mencari cara untuk menaklukan propinsi-propinsi Barat, kemudian mengejar dan menghancurkan pasukan Akechi Mitsuhide pada pertempuran Yamazaki, 13 hari setelah peristiwa pengkhianatan di kuil Honno.

Sebagai Jendral yang dipercaya oleh Nobunaga, Hideyoshi memiliki kemampuan untuk melancarkan aksi-aksi untuk menjatuhkan kekuatan dan kekuasaan lawan-lawannya, baik dengan cara diplomasi maupun dengan invasi militer, sehingga satu-persatu kedaimyoan berhasil ditundukkan dan berhasil menaklukan para daimyo dari seluruh negeri. Dengan kemampuannya itulah Toyotomi Hideyoshi berhasil melanjutkan ambisi Oda Nobunaga, yaitu mempersatukan Jepang.

Agar dapat dicapai pemerintahan yang baik, setelah penyatuan Jepang yang dilakukan oleh Toyotomi Hideyoshi, diperlukan penanganan lebih lanjut, antara lain mengeluarkan beberapa kebijakan politik untuk menopang kekuasaannya. Langkah yang diambil oleh Hideyoshi antara lain dengan dikeluarkannya dua peraturan penting yaitu, peraturan kepemilikan tanah (*Taiko Kenchi*) dan peraturan pelucutan pedang (*Katanagari*). Kedua peraturan ini secara strategis bermaksud mengontrol kekayaan para tuan tanah dan mengontrol para petani agar tidak melakukan perlawanan atau pemberontakan bersenjata.

*Katanagari* adalah sebuah keputusan untuk melarang semua orang di luar kaum *samurai*, khususnya petani, dalam memiliki senjata. Hal ini dapat dilihat sebagai politik pemisahan antara kaum *samurai* (prajurit yang mengabdikan pada *daimyo*) dan kaum petani, tujuannya adalah untuk memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap kaum *samurai*. Kebijakan pemisahan ini pun memiliki tujuan khusus dan dapat dilihat sebagai satu langkah ke depan untuk memisahkan kekuatan antara *samurai* dan petani.<sup>2</sup> Selain itu *Katanagari* juga bertujuan untuk menghindari terjadinya pemberontakan yang akan dilakukan oleh petani. Kebijakannya ini ternyata tidak hanya berguna saat Hideyoshi berkuasa, tetapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan dan keadaan sosial masyarakat masa pemerintahan penguasa setelahnya.

---

<sup>2</sup> *The Cambridge History of Japan Vol. 4 Early Modern Japan* edited oleh J.W. Hall, 1991, hal. 122

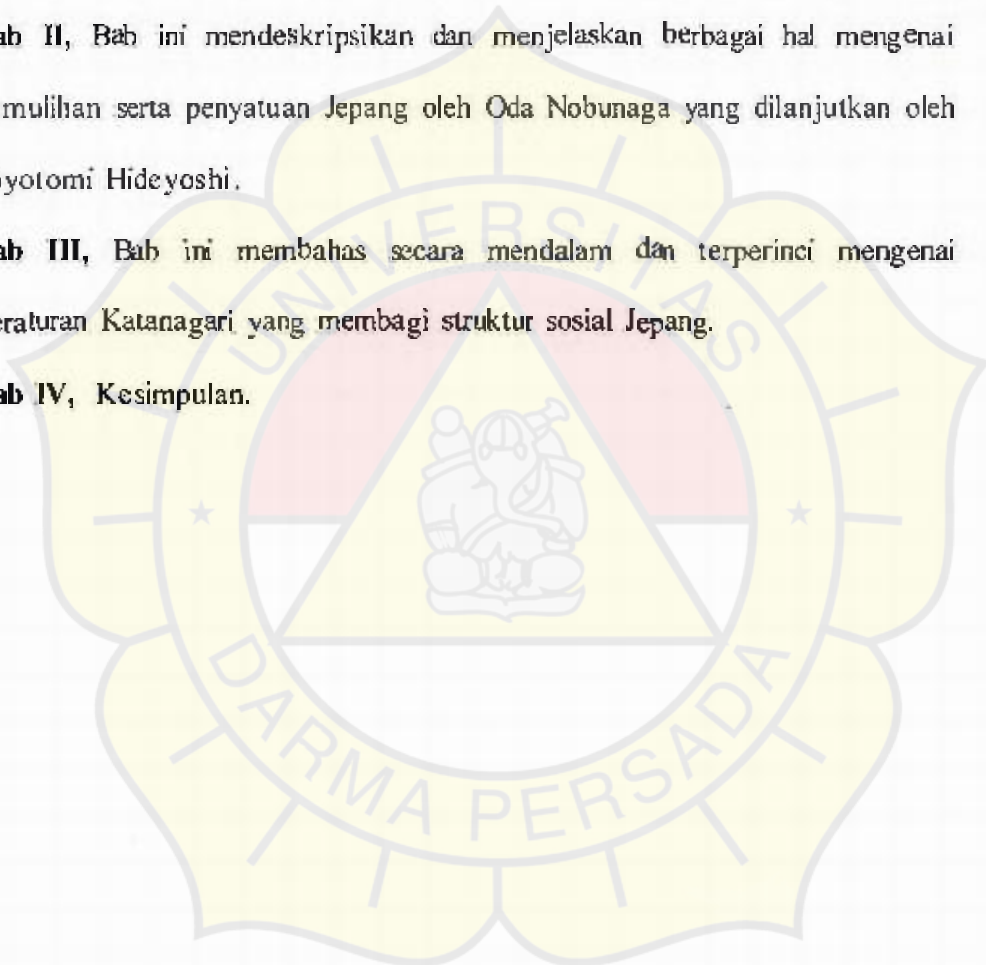
## **F. Sistematika Penulisan**

**Bab I,** Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II,** Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai hal mengenai pemulihan serta penyatuan Jepang oleh Oda Nobunaga yang dilanjutkan oleh Toyotomi Hideyoshi.

**Bab III,** Bab ini membahas secara mendalam dan terperinci mengenai peraturan Katanagari yang membagi struktur sosial Jepang.

**Bab IV,** Kesimpulan.



## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan Katanagari ?
2. Apa tujuan dikeluarkannya peraturan Katanagari?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Latar belakang dikeluarkannya peraturan Katanagari.
2. Tujuan dikeluarkannya peraturan Katanagari.

## D. Ruang Lingkup

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah ditulis, penelitian dimulai pada akhir abad ke-16 dimana Jepang sedang dilanda masa peperangan antar penguasa daerah (*daimyo*) hingga berhasil dipersatukannya Jepang sampai dikeluarkannya peraturan mengenai larangan kepemilikan senjata pada kaum petani.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pembahasan bersifat deskriptif analisis.